

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1 Teori Agensi (Agency Theory)

Agency Theory ini merupakan teori yang menerangkan hubungan antara agen dengan principal. Menurut Jensen dan Mecking (1976), Dasar teori agensi yaitu berupa perjanjian yang berisi proporsi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (yang saling tarik menarik). Namun, dalam prakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antara principal dan agent sehingga menimbulkan konflik kepentingan atau *agency problem*. Untuk menetralsir masalah tersebut *principal* dan *agent* setuju untuk menggunakan auditor sebagai penengah konflik tersebut. Principal pada penelitian ini adalah perusahaan yang sedang diaudit sedangkan agen ini adalah auditor yang mengaudit laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Bukhori (2012) seorang *principal* akan memberikan tanggung jawab atas pengembalian keputusan kepada seorang agent sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati yang berisikan tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, *agency theory* ini akan berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara principal dan agent.

Asimetri informasi selalu ada saat informasi yang dimiliki dan didapatkan satu pihak dan pihak lain berbeda dan tidak saling terbuka, yang mana pihak yang memiliki informasi lebih tidak terbuka memberikan informasi yang dimiliki karena adanya kepentingan pribadi yang akan menimbulkan moral hazard antara pemilik dan manajer. Moral hazard merupakan keadaan dimana risiko yang terjadi akan ditanggung oleh pihak yang seharusnya tidak menanggung resiko tersebut, dalam teori ini pihak pemilik harus menanggung resiko kejadian yang dilakukan oleh manajemen karena ketidakterbukaan informasi yang dilakukan manajemen.

Hubungannya dengan audit *delay* adalah audit *delay* mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi pelaporan keuangan dan ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara informasi yang ingin disajikan dengan pelaporan, apabila suatu informasi tersebut menjadi kurang. Berkurangnya informasi yang disampaikan kepada prinsipal menimbulkan asimetri informasi. Asimetri informasi itu sendiri merupakan bagian dari teori agensi, hal ini menyebabkan pihak agen akan lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan lebih detail dibandingkan dengan pihak principal yang hanya mengetahui informasi eksternal perusahaan melalui kinerja yang dibuat manajemen. Oleh karena itu, pentingnya ketepatan waktu publikasi laporan keuangan mengurangi adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal sehingga laporan keuangan akan dapat disampaikan secara transparan kepada prinsipal.

2 *Positive Accounting Theory (PAT)*

Teori akuntansi positif (PAT) menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. *Positive Accounting Theory (PAT)* bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam PAT didasarkan pada proses kontrak (*contracting process*) atau hubungan keagenan antara manajer dengan pihak lain seperti investor, kreditor, auditor, BAPEPAM, dan pemerintah (Chariri dan Ghozali, 2011).

Laporan keuangan sebenarnya merupakan cermin perilaku oportunistik seseorang yang menyusun laporan keuangan tersebut (Sulistyanto, 2008). Baik buruknya kinerja yang disajikan dalam laporan keuangan akan dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan penyusunnya, bukan kinerja perusahaan yang sesungguhnya.

Ada tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dipergunakan untuk menguji perilaku etis seseorang dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan (Chariri dan Ghozali, 2001).

1. Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus plan hypothesis*)

Manajemen perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima. Konsep ini menjelaskan bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya

memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba agar selalu nampak telah mencapai tingkat kinerja sesuai kontrak akan mendapatkan bonus (Sulistyanto, 2008).

Manajer memainkan angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan hingga bonus itu selalu didapatkannya. Ketika kinerja perusahaan berada di bawah syarat untuk memperoleh bonus, maka manajer akan melakukan mengatur dan mengelola laba agar dapat mencapai tingkat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bonus. Sebaliknya, jika kinerja yang diperoleh manajer jauh di atas jumlah yang disyaratkan untuk mendapatkan bonus, manajer akan mengelola dan mengatur laba agar laba yang dilaporkan menjadi tidak terlalu tinggi.

2. Hipotesis Hutang/Ekuitas (*Debt/Equity Hypothesis*)

Debt/Equity Hypothesis menyatakan makin tinggi rasio antara hutang dan ekuitas, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Manajer memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba untuk dapat melonggarkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Makin tinggi batasan kredit, makin besar juga kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya.

Laba merupakan indikator kemampuan perusahaan untuk dapat menyelesaikan kewajiban hutangnya. Karena itu manajer akan

mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutang yang jatuh tempo tahun ini dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Upaya ini dilakukan agar dana untuk menyelesaikan kewajiban hutang tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain.

3. Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Hipotesis ini menyatakan perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periode dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan variabel proksi dari aspek politik. Perusahaan besar biasanya memiliki biaya politik besar. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian.

Tiga hipotesis tersebut menunjukkan bahwa teori positif mengakui adanya 3 hubungan keagenan (1) antara manajemen dengan politik, (2) antara manajemen dengan kreditur, (3) antara manajemen dengan pemerintah. Masalah *agency muncul* disebabkan karena adanya asimetri informasi antara *agent* dan *principal*, dimana *agent* lebih banyak mempunyai informasi dibandingkan *principal*, sehingga menyebabkan adanya moral *hazard*.

3 **Audit Delay**

Menurut Estrini (2013) keterlambatan waktu laporan keuangan audit yang disampaikan oleh auditor kepada perusahaan dapat mempengaruhi kualitas informasi dari laporan tersebut karena panjangnya waktu tunda audit menunjukkan bahwa informasi yang diberikan tidak *out of date* dan

informasi yang lama menunjukkan bahwa kualitas dari laporan keuangan audit tersebut tidak baik atau buruk. Kerelevansian suatu laporan keuangan audit diperoleh apabila laporan keuangan auditan tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu pada saat dibutuhkan.

Menurut Prabowo dan Marsono (2013) auditor mempunyai tanggungjawab yang sangat besar pada perusahaan untuk menyelaisaikan hasil auditnya, tanggung jawab yang besar ini akan memicu seorang auditor ini akan bekerja dengan lebih professional dan salah satu kriteria professional itu adalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan auditnya. Haryani dan Wiratmaja (2014) suatu perusahaan apabila mengalami audit *delay* yang berkepanjangan akan merugikan perusahaan, audit *delay* ini akan menghilangkan citra baik dimata investor perusahaan tersebut dan terlambatnya publikasi laporan keuangan tersebut maka akan mempersulit investor dalam mengambil keputusan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut.

4 Komite Audit

Secara internal kondisi suatu perusahaan dipengaruhi oleh komite audit sesuai dengan peraturan Bapepam dengan surat edaran No. SE-03/PM/2000 suatu perusahaan publik yang sudah terdaftar di pasar modal diwajibkan untuk membentuk komite audit minimal 3 orang yang dipimpin oleh komisaris independen dan 2 orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Haryani dan Wiratmaja (2014) komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan

membantu Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan dalam melakukan proses audit laporan keuangan.

5 Reputasi KAP

Suatu perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan akuntan publik kepada bapepam dengan adanya pihak eksternal perusahaan yaitu kantor akuntan publik (KAP). Oleh karena itu, pentingnya jasa KAP dalam perusahaan sangat penting untuk menyampaikan informasi tentang kinerja perusahaan kepada publik supaya akurat dan terpercaya dan informasi laporan keuangan harus disajikan dengan akurat oleh kantor akuntan publik (KAP). Febrianty (2011) bahwa, kantor akuntan publik (KAP) *Big Four* dianggap dapat menyelesaikan laporan auditnya secara efisien dan juga memiliki jadwal waktu yang cepat supaya pengerjaan laporannya tepat pada waktunya. Waktu bagi kantor akuntan publik (KAP besar) sangatlah penting, karena untuk mempertahankan reputasinya dan apabila tidak menyelesaikan laporan auditnya dengan cepat atau tepat waktu maka bisa jadi tahun kedepan akan kehilangan kliennya.

Berikut kategori Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan The Big Four di Indonesia, yaitu:

- a. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
- b. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama dengan KAP Siddharta dan Widjaja.

- c. KAP Ernst & Young, yang bekerja sama dengan KAP Purwantono, Suherman dan Surja.
- d. KAP Deloitte Touche Tohmatsu, yang bekerja sama dengan KAP Osman Bing Satrio.

6 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur perusahaan yang dirancang untuk memberikan kepastian kepada manajemen yang telah mencapai sasaran dan tujuannya, diantaranya reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi operasi, ketaatan pada hukum dan peraturan (Arens dan Mark S. Beasley, 2008).

Disamping itu tanggungjawab seorang auditor sangatlah penting, untuk memahami pengendalian internal dan standar pekerjaan lapangan yang kedua dari (Arens, 2008) menyatakan “Auditor harus memiliki pemahaman yang cukup tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai apakah risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, penetapan waktu, dan luas prosedur audit lebih lanjut”.

Hal-hal yang harus diperhatikan seorang auditor untuk memahami pengendalian internal yang pertama pengendalian atas reliabilitas pelaporan keuangan dan yang kedua pengendalian atas kelas-kelas transaksi (Arens, 2008). UU Sarbanes-Oxley Section 404 (Arens, 2008) dalam pengendalian internal seorang auditor diwajibkan untuk memberikan suatu attestasi laporan keuangan mengenai suatu efektivitas pengendalian internal.

Atestasi merupakan jasa asuransi dimana KAP mengeluarkan laporan tentang reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Atestasi ini berupa audit atas laporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Pendapat opini yang dikeluarkan auditor atas efektivitas pengendalian internal yang dihasilkan dari atestasi tersebut. Efektivitas pengendalian internal perusahaan dapat dilihat dari opini auditornya. Perusahaan yang mempunyai pengendalian internalnya baik atau bagus menerima opini wajar tanpa pengecualian dan sebaliknya apabila pengendalian internalnya kurang bagus atau buruk menerima opini selain wajar tanpa pengecualian.

Menurut Carslaw dan Kaplan (1991), suatu perusahaan yang sudah mempunyai pengendalian internal yang baik maka seorang auditor tidak memerlukan waktu lama untuk menguji substansi dan ketaatan, sehingga dapat lebih cepat untuk melakukan pengauditan dan menunda laporan audit kepada *public*. Disamping itu pengendalian internal yang baik mengurangi kesalahan ketika dalam melaporkan laporan keuangan audit perusahaan, dan auditor dapat dengan mudah untuk mengerjakan laporan keuangan audit. Ade (2011) sebaliknya apabila pengendalian internalnya lemah maka akan berdampak pada lamanya pelaporan keuangan dikarenakan auditor butuh waktu lama untuk mencari bukti-bukti yang kuat dan kompleks supaya opini auditor dapat terdukung.

7 **Kualitas Audit**

Menurut (Jensen dan Meckling, 1976) pengauditan merupakan suatu proses pengawasan dan peningkatan keselarasan informasi yang wujud antara manajemen dan pemegang saham. Pengauditan dilakukan dengan harapan dapat mengurangi kekeliruan terhadap sistem akuntansi. Oleh karena itu kualitas audit merupakan faktor utama yang mendapatkan perhatian khususnya dalam proses audit.

Kualitas merupakan komponen *profesionalisme* yang benar-benar harus dipertahankan oleh akuntan publik profesional. Independen disini berarti akuntan publik lebih mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan manajemen atau kepentingan auditor itu sendiri dalam membuat laporan audit. Oleh sebab itu, keberpihakan auditor dalam hal ini seharusnya lebih diutamakan pada kepentingan publik (IAI, 2001).

Kualitas audit dapat di lihat berdasarkan bagus atau tidaknya hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Hasil pemeriksaan dikatakan bagus apabila telah sesuai dengan satandar pengauditan. Beberapa standar pengauditan yaitu mutu professional, independensi, pertimbangan (judgement) yang akan di keluarkan untuk penilaian hasil audit.

Kualitas merupakan sesuatu yang harus dimiliki dan dipertahankan bagi akuntan publik, akuntan publik harus mengedepankan kepentingan publik dari pada kepentingan manajemen atau kepentingan pribadi auditor. Apapun kejadian dan peristiwa dapat terjadi saat auditor melakukan proses pemeriksaan baik itu proses salah saji, pemeriksaan dan yang lainnya dan

auditor harus bersikap independen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

8 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan setiap tindakan manajemen yang dapat mempengaruhi angka yang dilaporkan. "*Earnings management involves deliberate actions taken by management to meet earning objectives*" (Elders et al. 2010). Kimmel et al. (2010) mendefinisikan manajemen laba sebagai perencanaan *timing* pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian untuk mengatur laba bersih. Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi yang memiliki tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal demi mendapatkan keuntungan pribadi. Manajemen laba akan mengakibatkan laba tidak sesuai dengan realitas ekonomi, tetapi lebih karena keinginan manajemen untuk memperlihatkan sedemikian rupa sehingga kinerja mereka dapat terlihat baik.

Tindakan manajemen laba dapat menyebabkan laporan keuangan tidak menggambarkan keadaan perusahaan sebenarnya. "*The quality of earnings is greatly affected when a company manages earnings up or down to meet some targeted earnings number*" (Kimmel et al, 2010). Sehingga ini dapat merugikan pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan berisi informasi tinggi disebut sebagai laporan keuangan yang "*transparan, akurat, atau memiliki kualitas yang tinggi*" karena mengandung informasi yang relevan bagi investor (Scott 2009).

Scott (2009) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba, yaitu:

1. *Bonus purposes*

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara *oportunistik* untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.

2. *Political motivation*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

3. *Taxation motivation*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk penghematan pajak pendapatan.

4. Pergantian CEO

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

5. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai dasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan

manajemen laba dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

Menurut Scott (2009) manajemen laba dilakukan dengan pola sebagai berikut :

- a. *Taking a bath* adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya atau sesudahnya.
- b. *Minimalisasi* laba (*income minimization*) adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya.
- c. *Maksimisasi* laba (*income maximization*) adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi dari pada laba sesungguhnya.
- d. *Perataan* laba (*income smoothing*) adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode-periode tertentu menunjukkan fluktuasi yang normal dalam rangka mencapai kecenderungan atau tingkat laba yang diinginkan.

9 Agresivitas Pajak

Definisi tindakan agresivitas pajak menurut Frank et al (2009) adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong pelanggaran pajak. Hanlon dan Heitzman (2013) mendefinisikan agresivitas pajak adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan

menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam *grey area*. Ridha dan Martani (2014) agresivitas pajak adalah tindakan yang tidak hanya dari ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, namun juga berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat Frank et al (2009), Hanlon dan Heitzman (2013), dan Ridha dan Martani (2014) dapat disimpulkan agresivitas pajak adalah suatu tindakan atau strategi tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan tindakan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan atau dengan menggunakan celah hukum atau *loop-holes*. Keadaan-keadaan tersebut menyebabkan munculnya perbedaan persepsi antara satu pihak dengan pihak lain. Kondisi ini menjadi peluang wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan menggunakan kelemahan hukum sebagai argument pembenaran atas penggelapan pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (chen et al. 2010). Walaupun tidak semua tindakan itu melanggar peraturan, namun semakin banyak kesempatan yang digunakan maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Menurut Hidayanti (2013) terdapat keuntungan dan kerugian dari tindakan agresivitas pajak. Keuntungan dari melakukan agresivitas pajak, yaitu :

- a. Penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
- b. Secara langsung maupun tidak langsung manajer mendapatkan kompensasi atau bonus dari pemilik/pemegang saham atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.

Sedangkan kerugian dari tindakan agresivitas pajak diantaranya adalah :

- a. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak.
- b. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak, yang menyebabkan turunnya harga saham perusahaan.

Keuntungan dan kerugian dari tindakan agresivitas pajak ini membuat manajer sebagai pembuat keputusan perusahaan harus memperhitungkan tindakan yang diambilnya. Apabila keputusan yang diambil oleh manajer menyebabkan kerugian, maka dapat menyebabkan konflik antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajer. Semakin buruk konflik antara kedua pihak ini membawa dampak buruk terhadap perusahaan, konflik ini dikenal dengan nama *agency problem* (Hidayanti, 2013).

B. Penelitian Terdahuludan Penurunan Hipotesis

1. Komite Audit

Dalam suatu perusahaan adanya komite audit sangatlah penting untuk melakukan penyusunan laporan keuangan audit. Disamping itu komite audit

harus memantau jalannya suatu rencana dan dilaksanakan dan juga sekaligus mengevaluasi penyusunan laporan keuangan. Perusahaan publik yang sudah terdaftar di pasar modal atau sudah *go public* harus diwajibkan untuk membentuk suatu komite audit minimal 3 orang. Dikarenakan agar suatu perusahaan dapat untuk meminimalkan keterlambatan dalam suatu pelaporan keuangan publik yang di publikasikannya, karena anggota komite audit sendiri dapat menentukan lamanya audit *delay* dalam suatu persahaan tersebut. Apabila anggota komite audit itu semakin banyak maka terjadinya keterlambatan laporan juga semakin kecil karena yang bekerja untuk mengaudit semakin banyak maka informasi yang digunakan untuk mengaudit juga semakin cepat dikumpulkan sehingga akan mengurangi terjadinya audit *delay*. Karena komite audit ini berlawanan arah dengan audit *delay*.

Semakin banyak komite yang dibentuk maka akan semakin cepat juga proses audit yang dilakukan. Dimas (2016) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap audit *delay*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mumpuni (2011), Prabowo dan Marsono (2013), dan Haryani dan Wiratmaja (2014) maka peneliti dapat menarik hipotetesis yaitu:

H₁ : Komite audit berpengaruh negatif terhadap audit *delay*.

2. Reputasi KAP

Pentingnya jasa KAP yang disewa perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat percaya masyarakat mengenai kompleksnya laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan.

KAP yang besar pastinya memiliki seorang akuntan yang sangat berpengalaman dan mempunyai kualitas baik, dibandingkan dengan KAP yang kecil sehingga dapat bekerja lebih cepat dan tepat waktu.

Hal ini menjadikan waktu audit yang ditempuh akan semakin cepat. Lestari (2010) waktu audit yang cepat adalah salah satu cara KAP untuk mempertahankan kualitasnya. Pada umumnya KAP *big four* memiliki sumber daya yang lebih besar, baik dari segi kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor maupun fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan dibandingkan *non big four* sehingga KAP *big four* dapat menyelesaikan pekerjaan audit lebih efektif dan efisien.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu mendapatkan hasil yaitu reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit *delay*. Sebut saja penelitian yang dilakukan Pasca dan Roza (2013), Shukeri dan Islam (2012), dan Silvia dan Wirakusuma (2013) mendapatkan hasil bahwa reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit *delay*. Dari penemuan penelitian diatas dapat disimpulkan suatu perusahaan yang menggunakan jasa KAP *big four* lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan yang di audit dikarenakan memiliki mutu kualitas yang sangat baik, maka dapat ditarik hipotesis yaitu :

H₂ : Reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit *delay*.

3. Sistem Pengendalian Internal

Dalam suatu perusahaan pengendalian internal sangat penting untuk memberikan suatu bukti yang cukup layak dalam tujuan manajemen,

tujuannya antara lain reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan juga ketaatan pada ketentuan hukum peraturan yang berlaku (Arens, 2008).

Sistem pengendalian internal dalam perusahaan dibuat untuk panduan bagi individu yang ada di dalamnya. Perusahaan yang menjalankan sistem pengendalian internal dengan baik dapat menekan jumlah temuan pelanggaran dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, ketika sistem pengendalian internal dapat dijalankan dengan baik akan memudahkan auditor dalam mengaudit laporan perusahaan tersebut. Sehingga ketika sistem pengendalian internal dapat dijalankan dengan baik proses audit yang dijalankan akan lebih cepat.

Perusahaan yang telah mempunyai pengendalian yang baik maka akan dapat meminimalisir kesalahan pada saat mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya, dan dapat memudahkan kinerja seorang auditor untuk melakukan audit laporan keuangannya. Apabila suatu perusahaan mempunyai pengendalian internnya itu lemah maka akan berdampak keterlambatan laporan keuangan yang lama dikarenakan seorang auditor harus mencari bukti-bukti yang kompleks untuk mendukung opininya. Sependapat dengan Ade (2011) dan Sa'adah (2013), maka peneliti dapat menarik hipotesis yaitu:

H₃ : Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap audit delay.

4. Kualitas Audit

Menurut (Jensen dan Mecking, 1976) pengauditan merupakan suatu proses pengawasan dan peningkatan keselarasan informasi antara manajemen dan pemegang saham. Pengauditan dilakukan dengan harapan dapat mengurangi kekeliruan terhadap sistem akuntansi. Oleh karena itu, kualitas merupakan faktor utama yang mendapatkan perhatian khususnya proses audit.

Kualitas merupakan sesuatu yang harus dimiliki dan dipertahankan bagi akuntan publik, akuntan publik harus mengedepankan kepentingan publik dari pada kepentingan manajemen atau kepentingan pribadi auditor. Apapun kejadian dan peristiwa dapat terjadi saat auditor melakukan proses pemeriksaan baik itu proses salah saji, pemeriksaan yang lainnya dan auditor harus bersikap independen sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini untuk mengindikasikan jika kualitas audit semakin baik maka dapat diartikan penyelesaian kualitas audit semakin cepat dan audit delay semakin rendah. Dapat di indikasikan bahwa kualitas audit semakin tinggi dapat diartikan proses audit *delay* semakin rendah. Puspitasari dan Nurmala Sari (2012) dan Rachmawati (2008) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa kualitas audit terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap audit *delay*, maka peneliti menarik hipotesis yaitu :

H₄ : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap audit *delay*.

5. Manajemen Laba

Saleh (2004) dalam penelitiannya *extraordinary item* (pos-pos luar biasa) yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Perusahaan akan terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya jika perusahaan tersebut mencantumkan *extraordinary item* pada laporannya.

Audit *delay* merupakan hal yang penting diperhatikan oleh pengguna laporan keuangan yang sudah dipublikasi, apabila penyelesaian laporan keuangan audit lama maka terdapat indikasi adanya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Agen akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi permintaan komisaris dan pemegang saham untuk melihat kinerja perusahaan dari laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperoleh bukti-bukti terkait dengan hasil laporan keuangan perusahaan hingga mencapai opini dan selesainya laporan audit. Semakin banyak ketidaksesuaian hasil dengan bukti yang didapatkan auditor, maka semakin banyak bukti lain yang harus dikumpulkan auditor untuk mendukung hasil laporan keuangan tersebut. Hal inilah yang mempengaruhi lamanya laporan audit diterbitkan.

Penelitian Almilia dan Setiady (2006), Ika dan Ghazali (2012), Khalatbari, dkk. (2013), dan Asthana (2014) mendukung adanya penyajian laporan audit yang semakin lama mengidentifikasi adanya praktik manajemen laba serta menurunkan kualitas laba, maka peneliti dapat menarik hipotesis yaitu :

H₅ : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap audit *delay*.

6. Agresivitas Pajak

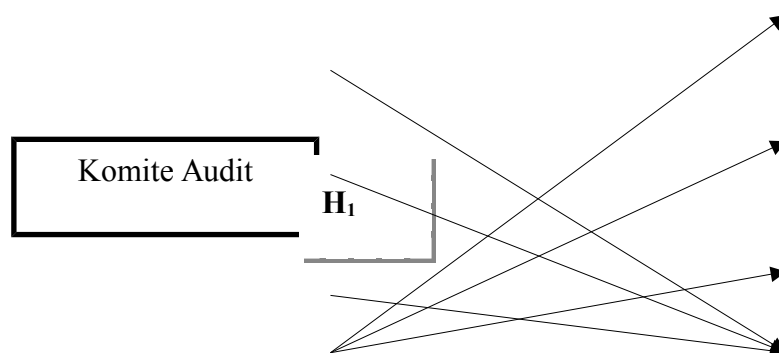
Adanya asimetri informasi menyebabkan manajer memiliki informasi yang lebih dibandingkan pemegang saham mengenai kondisi

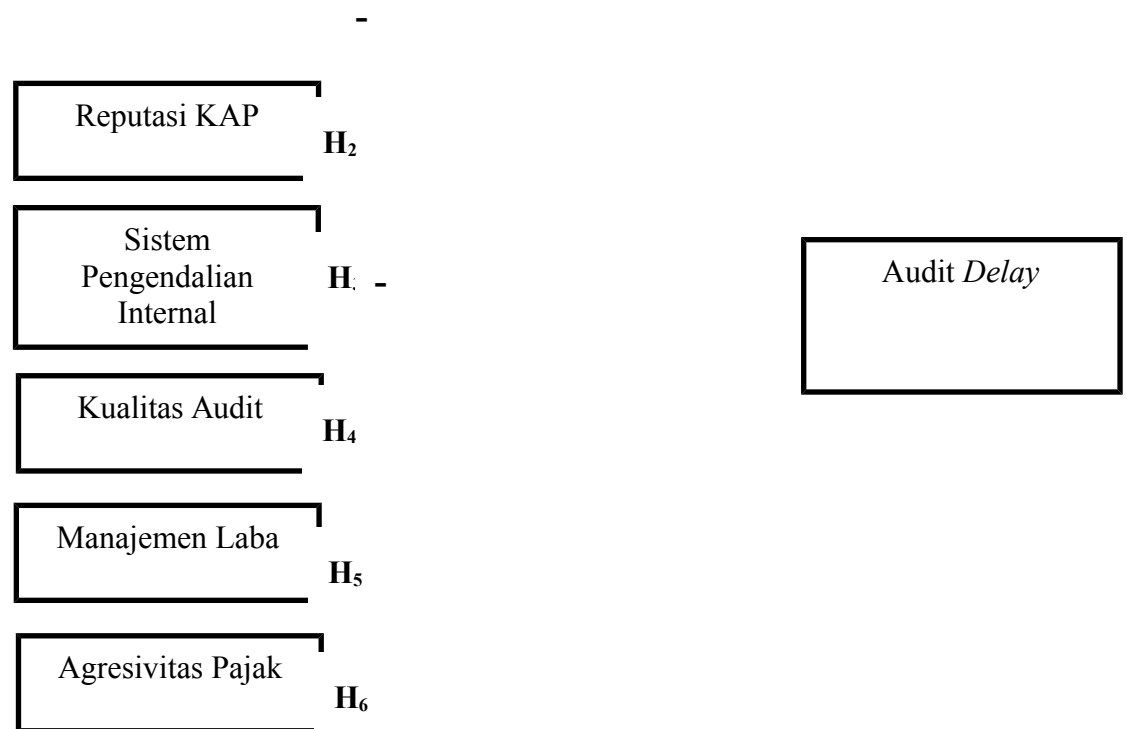
perusahaan. Keadaan tersebut menyebabkan munculnya perbedaan persepsi antara satu pihak dengan pihak lain. Kondisi ini menjadi peluang wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan menggunakan kelemahan hukum sebagai argument pembenaran atas penggelapan pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan Chen et al. (2010). Mulianingsih dan Sukartha (2017) walaupun tidak semua tindakan itu melanggar peraturan, namun semakin banyak kesempatan yang digunakan maka perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Auditor memerlukan waktu yang cukup lama untuk memastikan temuan-temuan tindakan tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, dan pentingnya auditor untuk memperbaiki temuan-temuan tindakan tersebut yang didapat di laporan keuangan oleh seorang manajer. Sehingga kemungkinan akan terjadi kemunduran masa pelaporan keuangannya atau bisa disebut audit *delay*. Didukung dalam penelitian Brian dan Martani (2014) bahwa tindakan penghindaran pajak berpengaruh pada waktu publikasi laporan keuangan. Maka peneliti dapat menarik hipotesis yaitu :

H₆ : Agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap audit *delay*.

C. Model Penelitian





Gambar 2.1
Model Penelitian